

ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI EKS KARESIDENAN PATI

Novita Triyaswuri, Joko Sutrisno, Raden Kunto Adi

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jl Ir. Sutami No. 36 Ketingan Surakarta 57126 Telp/Fax (0271)637457
Email : novita.triya81@gmail.com

ABSTRACT: *This research aims to determine the condition of the agriculture, forestry and fisheries sector whether to be a base or non-base sector and to know the contribution of the agriculture, forestry and fisheries sectors in reducing income inequality in the Pati Residency. The basic method of research is descriptive. The method of determining the location in the research was intentional or purposive. The type of data used in the research is secondary data, namely Gross Regional Domestic Product (GRDP) and population. Data analysis method uses the Minimum Requirement Technique (MRT) and Williamson Index. The results of the research showed that the agriculture, forestry and fisheries sectors were the base sectors in Rembang, Blora, Jepara and Pati. The agriculture, forestry and fisheries agriculture sector is a non-base sector in Kudus Regency. The agriculture, forestry and fisheries sectors play a role in reducing income inequality in Pati's former residence. This is supported by the value of greater inequality if the agricultural sector is excluded*
Keywords : *Inequality, Contribution, Minimum Requirement Technique, Williamson Index*

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan apakah menjadi sektor basis atau non basis dan untuk mengetahui kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Eks Karesidenan Pati. Metode dasar penelitian adalah deskriptif. Metode penentuan lokasi dalam penelitian adalah secara sengaja atau *purposive*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk. Metode analisis data menggunakan *Minimum Requirement Technique* (MRT) dan Indeks Williamson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor basis di Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor non basis di Kabupaten Kudus. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Eks karesidenan Pati. Hal ini di dukung dengan nilai ketimpangan lebih besar apabila sektor pertanian dikeluarkan dari perhitungan.

Kata kunci : Ketimpangan, Kontribusi, Indeks Williamson, *Minimum Requirement Technique*.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang baik dan distribusi pendapatan yang merata tanpa adanya ketimpangan pendapatan. Selain untuk menyejahterakan masyarakat, pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk mengejar ketertinggalan serta menyejajarkan dengan daerah yang maju. Ada beberapa faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar penduduk (Todaro, 2006).

Masalah ketimpangan pendapatan antar wilayah disebabkan oleh perbedaan potensi daerah seperti adanya kandungan alam minyak dan gas atau tingkat kesuburan lahan antara daerah satu dengan daerah lain yang tidak sama. Adanya perbedaan kondisi geografis dan ketenagakerjaan. Mobilitas barang dan orang antar daerah juga turut mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan regional (Sjafrizal, 2014).

Sektor pertanian sebagai salah satu sektor ekonomi termasuk sektor yang sangat potensial dalam memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, baik dari segi pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja. Peranan sektor pertanian dalam

pembangunan Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Usaha dalam sektor pertanian akan selalu berjalan selama manusia masih memerlukan makanan untuk mempertahankan hidup dan manusia masih memerlukan hasil pertanian sebagai bahan baku dalam industrinya (Hayati *et al.*, 2017).

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor dan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan. Sektor pertanian mampu mengurangi ketimpangan karena pertumbuhan sektor pertanian lebih tinggi daripada sektor yang lain. Selain itu juga banyak penduduk yang masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (Diao *et al.*, 2010).

Penelitian ini dilakukan di Eks Karesidenan Pati yang merupakan sebuah pembagian administratif Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Rembang. Nilai PDRB setiap kabupaten di Eks Karesidenan Pati berbeda-beda, karena masing-masing kabupaten memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda. PDRB masing-masing kabupaten di Eks Karesidenan Pati dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Menurut Kabupaten di Eks Karesidenan Pati Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Kabupaten	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rembang	9.780.750,39	10.284.274,36	10.850.269,20	11.418.008,73	12.123.468,84
Blora	11.712.504,85	12.227.201,29	12.882.587,70	15.913.432,03	16.843.360,54
Jepara	15.623.738,87	16.374.715,21	17.210.365,92	18.074.134,88	19.001.040,83
Pati	22.329.693,98	23.365.213,99	24.770.325,07	26.121.955,34	27.532.168,10
Kudus	59.944.556,52	62.600.680,87	65.029.937,50	66.669.085,40	68.649.053,55
Total	119.391.244,61	124.852.085,72	130.743.485,39	138.196.616,38	144.149.091,86

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 1 menunjukkan bahwa besaran PDRB ADHK (2010) Eks Karesidenan Pati pada tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Pati memiliki kegiatan ekonomi yang positif dan produktif. PDRB terbesar di Eks Karesidenan Pati adalah Kabupaten Kudus, sedangkan Kabupaten yang memiliki jumlah masing kabupaten di Eks Karesidenan Pati menurut indek gini dapat dilihat pada Tabel 2

PDRB terkecil di Eks Karesidenan Pati adalah Kabupaten Rembang.

Pembangunan ekonomi selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga berperan dalam mengurangi adanya ketimpangan pendapatan agar distribusi pendapatan merata ke semua lapisan masyarakat. Indeks gini rasio menjadi satu indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan. Kondisi ketimpangan di masing-

Tabel 2. Indeks Gini Menurut Kabupaten di Eks Karesidenan Pati Tahun 2011-2015

Kabupaten	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Rembang	0.27	0.33	0.32	0.33	0.33
Blora	0.33	0.38	0.41	0.39	0.39
Jepara	0.32	0.35	0.33	0.31	0.31
Pati	0.29	0.29	0.30	0.31	0.31
Kudus	0.35	0.34	0.34	0.37	0.37

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 2 menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang, Blora, Pati dan Kudus selalu mengalami peningkatan ketimpangan setiap tahunnya, sedangkan Kabupaten Jepara pada

tahun 2013-2015 justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan masih menjadi masalah bagi pembangunan daerah. Oleh sebab itu diperlukan analisis

kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan sebagai upaya

METODE PENELITIAN

Metode Dasar Penelitian

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang tidak hanya sekedar menghimpun data tetapi juga menganalisis data. Prosedur kerja dari penelitian deskriptif adalah mengumpulkan data, menyusun dan memilah-milahnya, kemudian menganalisis dan menginterpretasi data tersebut (Saifudin *et al.*, 2017)

Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder PDRB, PDRB perkapita dan jumlah

Tabel 3. Rata-Rata Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Menurut Eks Karesidenan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Eks Karesidenan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kedu	11.268.875,21	11.850.046,52	12.485.611,30	13.126.124,68	13.742.232,20
Pekalongan	13.102.041,11	13.786.079,35	14.543.683,59	15.319.557,28	16.114.473,31
Surakarta	19.314.782,42	20.363.757,99	21.492.755,58	22.653.614,86	23.887.503,50
Pati	23.878.248,92	24.970.417,14	26.148.697,08	27.639.323,28	28.829.818,37
Semarang	27.602.986,43	29.227.880,81	30.885.587,25	32.621.647,91	34.442.062,72
Banyumas	33.159.300,74	34.446.686,55	36.479.785,42	38.404.403,96	39.861.457,47

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2018, Data diolah

Tabel 3 menunjukkan bahwa Eks Karesidenan Pati dipilih karena memiliki rata-rata PDRB tertinggi ketiga setelah Eks Karesidenan Banyumas dan Semarang. Nilai PDRB tersebut juga didukung oleh adanya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor pertanian, kehutanan

pembangunan ekonomi di Eks Karesidenan Pati

penduduk yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bappeda dan Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Rembang.

Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Pengambilan daerah penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) yaitu proses pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja berdasarkan beberapa pertimbangan. Pemilihan lokasi penelitian di Eks karesidenan Pati. Pertimbangan penelitian dilakukan di Eks Kresidenan Pati berdasarkan nilai PDRB masing-masing Eks Karesidenan di Provinsi Jawa Tengah sesuai pada Tabel 3.

dan perikanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Eks Karesidenan Pati.

Metode Analisis Data Analisis Basis dan Non Basis Sektor Pertanian di Eks Karesidenan Pati

(MRT) *Minimum Requirement Technique* digunakan untuk

membandingkan sektor basis dan non basis dalam lingkup antar daerah. Apabila perhitungan atau nilai *share* sektor memiliki angka minimum, maka sektor tersebut dikatakan sebagai sektor non basis. Sedangkan daerah lain yang memiliki nilai *share* lebih besar dari angka minimum dikatakan sebagai sektor basis. Daerah lain yang memiliki sektor basis mampu mengeksport produksi barang dan jasa ke daerah yang memiliki sektor non-basis.

Menurut Dinc (2002) *Minimum Requirement Technique* (MRT) dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut :

$$Share = \frac{E_r}{E_r} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana E_{ir} adalah PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang diteliti di wilayah r, E_r adalah Total PDRB di wilayah r, i adalah Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, r adalah 5 Kabupaten (Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Rembang)

Analisis Ketimpangan Pendapatan di Eks Karesidenan Pati

Alat analisis tingkat ketimpangan wilayah di Eks Karesidenan Pati menggunakan Indeks Williamson. Analisis Indeks Williamson menggunakan indikator PDRB Per Kapita dan jumlah penduduk. Data tersebut dibandingkan antar kabupaten di Eks Karesidenan Pati untuk mengukur tingkat ketimpangan yang terjadi. Menurut Sjafrizal (2014) Indeks

Williamson dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2 / n}}{\bar{y}} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana V_w adalah Indeks Williamson, y_i adalah PDRB per kapita di Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Rembang, \bar{y} adalah PDRB per kapita rata-rata seluruh kabupaten di Eks karesidenan Pati, n adalah Jumlah penduduk di Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Rembang, n adalah Jumlah penduduk seluruh kabupaten di Eks karesidenan Pati.

Menurut Kusumantoro (2009) ketimpangan pendapatan dapat dikategorikan menjadi tiga kriteria yaitu ketimpangan pendapatan rendah apabila

- a. Nilai V_w menunjukkan angka 0,0 sampai 0,34, artinya ketimpangan pendapatan rendah
- b. Nilai V_w menunjukkan angka 0,35 sampai 0,8, artinya ketimpangan pedapatan sedang
- c. Nilai V_w menunjukkan angka diatas 0,8, artinya ketimpangan pendapatan tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Basis dan Non Basis Sektor Pertanian di Eks Karesidenan Pati

Minimum Requirement Technique digunakan untuk membandingkan sektor basis dan non basis dalam lingkup antar daerah. Apabila perhitungan atau nilai *share* sektor memiliki angka minimum, maka sektor tersebut dikatakan sebagai sektor non basis. Sedangkan daerah lain yang memiliki nilai shere lebih besar dari

Novita T. :Analisis Kontribusi Sektor....

angka minimum dikatakan sebagai sektor basis. Nilai *Share* Sektor

Pertanian, di Eks Karesidenan Pati dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai *Share* Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Menurut Kabupaten di Eks Karesidenan Pati Berdasarkan *Minimum Requirements Technique* (MRT) Tahun 2013-2017

No.	Kabupaten	Tahun					Kategori
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Rembang	0,32	0,29	0,29	0,28	0,27	Basis
2.	Blora	0,28	0,26	0,25	0,21	0,21	Basis
3.	Pati	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	Basis
4.	Jepara	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	Basis
5.	Kudus	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Non Basis

Sumber : Analisis Data Sekunder

Tabel 4 menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor basis di Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Blora karena memiliki nilai MRT diatas nilai minimum artinya sektor pertanian di kabupaten tersebut mampu mencukupi kebutuhan lokal dan sisanya diekspor ke luar wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan karena sektor tersebut menjadi sektor basis yang bisa dikembangkan di Eks Karesidenan Pati.

Sektor pertanian di Kabupaten Rembang didukung adanya produksi dari tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Hasil tanaman pangan terbesar di Kabupaten Rembang Tahun 2017 yaitu padi sawah dengan produksi sebesar 218.413 ton. Padi menjadi komoditas pangan pokok di Kabupaten Rembang. Hasil perkebunan terbesar di Kabupaten Rembang yaitu komoditas tebu dengan produksi Tahun 2017 sebesar 43.364 ton. Hasil komoditas tebu dimanfaatkan masyarakat untuk

memasok bahan baku di tiga pabrik gula yaitu Pabrik Gula Pakis Pati, Pabrik Gula Trangkil Pati, Pabrik Gula Rendeng Kudus. Hasil peternakan terbesar di Kabupaten Rembang yaitu ayam kampung dengan populasi Tahun 2017 sebesar 862.236 ekor. Hasil lain selain ayam kampung juga dikembangkan sapi potong. Sapi potong di Kabupaten Rembang Tahun 2017 yaitu 132.388 ekor.

Kehutanan di Kabupaten Rembang menunjukkan sepertiga wilayah Kabupaten Rembang adalah hutan. Luas hutan negara Tahun 2017 seluas 24.106,96 hektar dan luas hutan rakyat seluas 14.225,65 hektar. Hutan negara lebih besar daripada hutan rakyat. Kabupaten Rembang yang merupakan daerah pesisir pantai utara cocok dibudidayakan hutan mangrove. Perikanan Kabupaten Rembang merupakan sektor yang dikembangkan pemerintah setempat. Perikanan di Kabupaten Rembang banyak di budidayakan di tambak dengan produksi Tahun 2017 yaitu 5.511 ton.

Sektor pertanian di Kabupaten Blora didukung adanya produksi dari tanaman pangan, perkebunan,

peternakan, kehutanan dan perikanan. Tanaman pangan terbesar di Kabupaten Blora yaitu padi sawah dengan produksi Tahun 2017 sebesar 504.711 ton. Hasil produksi jagung di Kabupaten Blora Tahun 2017 juga paling tinggi diantara kabupaten yang lain di Eks Karesidenan Pati yaitu sebesar 350.905 ton. Komoditas perkebunan di Kabupaten Blora yang banyak dikembangkan yaitu tebu produksi Tahun 2017 terbesar yaitu sebesar 15.218 ton. Hasil tebu yang dihasilkan dikelola oleh industri pabrik gula PT. Gendhis Multi Manis yang ada di Kabupaten Blora. Peternakan di Kabupaten Blora menjadi salah satu sentra produksi sapi potong di Jawa Tengah, populasi sapi potong pada Tahun 2017 yaitu 222.718 ekor dan menempati urutan pertama di Jawa Tengah. Kehutanan di Kabupaten Blora menunjukkan luas hutan negara Tahun 2017 seluas 90.604,61 hektar dan luas hutan rakyat seluas 18.302,31 hektar.

Kehutanan yang menjadi sumber perekonomian daerah adalah dari produksi hutan dan hasil olahan hutan terutama hutan jati. Pembudidayaan ikan di Kabupaten Blora banyak di budidayakan di kolam daripada di laut. Hal tersebut dilakukan karena budidaya ikan air tawar lebih mudah dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Blora. Hasil produksi perikanan di budidayakan di laut Tahun 2017 yaitu 580,35 ton dan hasil produksi yang dibudidayakan di kolam Tahun 2017 yaitu 1.682 ton.

Sektor pertanian didukung adanya produksi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Pati terkenal dengan selogan

Bumi Mina Tani karena banyak yang bekerja di sektor pertanian. Luas wilayah di kabupaten Pati banyak dikembangkan sebagai areal pertanian. Pati memiliki produksi padi tertinggi dibanding kabupaten yang lain di Eks Karesidenan Pati. Hasil produksi padi sawah Tahun 2017 yaitu sebesar 620.206 ton. Perkebunan terbesar di Kabupaten Pati yaitu kelapa dengan produksi Tahun 2017 sebesar 6.088.626 ton. Kabupaten Pati memiliki komoditas unggulan yaitu kelapa kopyor. Produksi kelapa kopyor di Kabupaten Pati Tahun 2017 sebesar 883.967 ton. Peternakan yang banyak dikembangkan di Kabupaten Pati yaitu ayam, kambing dan sapi potong. Kabupaten Pati memiliki populasi ayam ras Tahun 2017 sebesar 9.738.288 ekor, ayam kampung 1.046.730 ekor, kambing 195.760 ekor dan sapi 102.071 ekor.

Kehutanan di Kabupaten Pati di terdiri dari hutan negara dan hutan rakyat. Hutan negara Tahun 2017 seluas 22.625,72 hektar dan luas hutan rakyat seluas 34.683,00 hektar. Hutan rakyat di Kabupaten Pati Menurut penelitian Irawanti (2012) merupakan salah satu model hutan rakyat sengon yang potensial. Kabupaten Pati tidak ada industri pengolahan kayu rakyat, sehingga kayu dari Pati dijual ke industri di luar Kabupaten Pati seperti ke Semarang, Temanggung, Kebumen dan bahkan ke Jawa Timur. Perikanan di Kabupaten Pati banyak dibudidayakan di tambak dengan produksi sebesar 31.755.94 ton. Hal tersebut menjadi peluang pengembangan usaha pengolahan perikanan berkaitan dengan

ketersediaan bahan baku. Potensi hasil perikanan di Kabupaten Pati sudah tersebar hingga ke luar wilayah Kabupaten, seperti ikan bandeng yang pemasarannya mencapai wilayah Semarang.

Sektor pertanian di Kabupaten Jepara didukung adanya produksi dari tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Tanaman pangan terbesar di Kabupaten Jepara yaitu padi sawah dengan produksi Tahun 2017 sebesar 258.173 ton. Padi merupakan komoditi yang penting karena padi merupakan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat Kabupaten Jepara. Perkebunan terbesar di Kabupaten

Jepara Tahun 2017 yaitu tebu dengan produksi sebesar 10.391 ton. Selain komoditas tebu komoditas kelapa juga banyak dikembangkan di Kabupaten

Jepara karena kabupaten jepara yang terletak di pesisir pantai utara banyak dibudidayakan tanaman kelapa. Hasil komoditas kelapa di Jepara juga tertinggi diantara kabupaten lain di Eks karesidenan Pati. Peternakan unggulan di Kabupaten Jepara yaitu ayam

Sektor pertanian menjadi sektor non basis di Kabupaten Kudus karena memiliki nilai *share* paling rendah/ minimum jika dibandingkan dengan kabupaten yang lain yang ada di Eks Karesidenan Pati. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Kudus hanya bisa mencukupi kebutuhan lokal saja. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Kudus menjadi sektor non basis karena lahan pertanian di Kabupaten Kudus paling kecil

kampung dengan populasi Tahun 2017 sebesar 647.055 ekor.

Kehutanan di Kabupaten Jepara terdiri dari hutan negara dan hutan rakyat. Hutan negara Tahun 2017 seluas 16.881,54 hektar dan luas hutan rakyat seluas 17.945,53 hektar. Hutan rakyat di Kabupaten Jepara dimanfaatkan untuk menanam kayu jati. Jepara yang terkenal dengan kota ukir membutuhkan pasokan bahan baku kayu jati yang banyak. Perikanan di Kabupaten Jepara banyak dibudidayakan di tambak dan dilaut. Produksi hasil perikanan di tambak yaitu 15.897 ton dan hasil budidaya laut 22.784 ton. Budidaya perikanan di Kabupaten Jepara banyak di kembangkan di laut karena kondisi geografisnya yang mendukung daerah pantai oleh sebab itu perikanan di Jepara banyak di budidayakan di laut. Sektor perikanan di Kabupaten Jepara selain berasal dari ikan segar, juga terdapat ikan olahan yang juga memiliki nilai produksi yang besar. Jenis olahan ikan dapat dapat dikeringkan menjadi kerupuk ikan dan terasi.

daripada kabupaten yang lain di Eks Karesidenan Pati sehingga produksi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Kudus sangat kecil.

Penggunaan lahan di masing-masing Kabupaten di Eks Karesidenan Pati terbagi menjadi tiga jenis yaitu lahan pertanian sawah, dan lahan pertanian bukan sawah dan bukan lahan pertanian. Penggunaan lahan di Eks karesidenan Pati dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Luas Lahan Sawah, Lahan Pertanian Bukan Sawah Dan Bukan Lahan Pertanian Menurut Kabupaten di Eks Karesidenan Pati Tahun 2017

No	Kabupaten	Lahan Sawah (Ha)	Lahan Pertanian Bukan Sawah (Ha)	Bukan Lahan Pertanian (Ha)	Jumlah Total (Ha)
1.	Rembang	29.061	52.561	19.787	101.408
2.	Blora	45.948	116.610	19.500	182.058
3.	Jepara	26.526	41.611	32.276	100.413
4.	Pati	59.229	60.314	30.825	150.368
5.	Kudus	20.561	9.791	12.164	42.516

Sumber : BPS Kabupaten Rembang 2018, BPS Kabupaten Blora 2018, BPS Kabupaten Jepara 2018, BPS Kabupaten Pati 2018, dan BPS Kabupaten Kudus 2018

Tabel 5 menunjukkan bahwa penggunaan lahan sawah banyak digunakan di Kabupaten Pati. Lahan pertanian bukan sawah banyak dimanfaatkan di Kabupaten Blora digunakan sebagai tegalan, perkebunan, hutan rakyat, tambak, kolam dan lainnya. Lahan bukan untuk usaha pertanian banyak dimanfaatkan di Kabupaten Jepara digunakan untuk bangunan dan jalan. Penggunaan lahan yang ada di Eks Karesidenan Pati terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya pengalihan fungsi lahan yang

Analisis Ketimpangan Pendapatan di Eks Karesidenan Pati.

Alat analisis tingkat ketimpangan wilayah di Eks Karesidenan Pati menggunakan Indeks Williamson. Analisis Indeks Williamson menggunakan indikator PDRB Per Kapita dan jumlah penduduk. Data tersebut dibandingkan antar kabupaten di Eks Karesidenan Pati untuk mengukur tingkat ketimpangan yang terjadi. Oleh karena adanya tujuan untuk mengetahui peran sektor pertanian dalam mengurangi

umumnya lahan pertanian digunakan untuk bangunan dan pengembangan industri, sehingga luas lahan pertanian mengalami penurunan tiap tahunnya.

Selain itu sektor utama perekonomian di Kabupaten Kudus yaitu sektor industri dengan kontribusi sebesar 80% terhadap PDRB Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus yang terkenal sebagai Kota Kretek menjadikan industri pengolahan tembakau yang mengolahnya menjadi rokok menjadi sektor perekonomian utama di Kabupaten Kudus.

ketimpangan pendapatan maka dilakukan juga perhitungan indeks Williamson dengan mengeluarkan PDRB sektor pertanian dari PDRB total. Kemudian membandingkan tingkat ketimpangan pendapatan dengan dan tanpa memasukkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Nilai Indeks Williamson Dengan dan Tanpa Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Nilai Indeks Williamson Dengan dan Tanpa Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Menurut Kabupaten di Eks Karesidenan Pati Tahun 2013-2017

Tahun	Rembang		Blora		Jepara		Pati		Kudus	
	Vw		Vw		Vw		Vw		Vw	
	Dengan Pertanian	Tanpa Pertanian	Dengan Pertanian	Tanpa Pertanian	Dengan Pertanian	Tanpa Pertanian	Dengan Pertanian	Tanpa Pertanian	Dengan Pertanian	Tanpa Pertanian
2013	0,148	0,196	0,209	0,246	0,250	0,257	0,166	0,219	0,720	0,862
2014	0,146	0,188	0,207	0,241	0,251	0,257	0,164	0,215	0,718	0,846
2015	0,144	0,185	0,204	0,236	0,252	0,257	0,158	0,211	0,709	0,836
2016	0,144	0,185	0,165	0,192	0,255	0,260	0,157	0,209	0,673	0,793
2017	0,140	0,178	0,159	0,185	0,255	0,259	0,151	0,202	0,659	0,775

Sumber : Analisis Data Sekunder

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai Indeks Williamson Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Blora memiliki nilai Indeks Williamson rendah yaitu antara 0,0-0,34. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten tersebut rendah. Sedangkan Kabupaten Kudus nilai Indeks Williamson tinggi yaitu diatas 0,8. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kudus tinggi. Kabupaten Kudus memiliki ketimpangan yang tinggi karena pendapatan dari sektor ekonomi hanya dinikmati oleh sektor tertentu tidak merata pada semua sektor sehingga mengakibatkan nilai ketimpangan yang tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor basis di Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati, sedangkan di Kabupaten Kudus sektor

Ketimpangan pendapatan juga dihitung dengan memasukkan sektor pertanian dan tanpa sektor pertanian untuk melihat apakah sektor pertanian mampu mengurangi ketimpangan pendapatan. Hasil analisis menunjukkan nilai Indeks Williamson tanpa sektor pertanian lebih tinggi dibanding dengan menggunakan sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian mampu mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Azifah D, Agustono, Setyowati N (2016) dimana sektor pertanian kehutanan dan perikanan mampu mengurangi ketimpangan pendapatan.

pertanian kehutanan dan perikanan menjadi sektor non basis.

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati adalah kecil, sedangkan Kabupaten Kudus ketimpangan daerahnya besar. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan

di Eks karesidenan Pati. Hal ini di dukung dengan nilai ketimpangan lebih besar apabila sektor pertanian dikeluarkan dari perhitungan Berdasarkan hasil penelitian saranyang diberikan sebagai berikut Pembangunan daerah di Eks Karesidenan Pati melalui mengembangkan sektor pertanian,

DAFTAR PUSTAKA

- Azifah D, Agustono, Setyowati N 2016. Identifikasi Subsektor Pertanian Dan Perannya Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Di Eks Karesidenan Kedu. *Jurnal SEPA* 12(2):182-192
- BPS Kabupaten Blora 2018. Kabupaten Blora Dalam Angka 2018. Blora : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora.
- BPS Kabupaten Jepara 2018. Kabupaten Jepara Dalam Angka 2018. Jepara : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara.
- BPS Kabupaten Kudus 2018. Kabupaten Kudus Dalam Angka 2018. Kudus : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus.
- BPS Kabupaten Pati 2018. Kabupaten Pati Dalam Angka 2018. Pati : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati.
- BPS Kabupaten Rembang 2018. Kabupaten Rembang Dalam Angka 2018. Rembang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang.
- kehutanan dan perikanan dengan intensifikasi pertanian. Pemerintah berperan dalam pemerataan agar tidak terjadi tingkat ketimpangan pendapatan salah satunya dengan meningkatkan produksi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan intensifikasi pertanian.
- BPS Provinsi Jawa Tengah 2018. Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2018. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Diao X, Hazel P, Thurlow J 2010. The Role of Agriculture in African Development. *Journal of World Development* 38(10): 1375-1385.
- Dinc, M 2002. *Regional and Local Economic Analysis Tools*. Washington, DC : The World Bank.
- Hayati M, Elfiana Martina 2017. Peranan Sektor Pertanian dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. *Jurnal Pertanian* 1(3):213-222
- Irawanti S, Suka A dan Ekawati S 2012. Manfaat Ekonomi dan Peluang Pengembangan Hutan Rakyat Sengon di Kabupaten Pati. *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan* 9(3): 126-139
- Kusumantoro 2009. Disparitas dan Spesialisasi Industri Manufaktur Kabupaten / Kota di Jawa Tengah, *Jurnal*

Novita T. :Analisis Kontribusi Sektor....

Ekonomi dan Kebijakan
2(2):104-113.

Saifudin, Syuhudi M, Suardi I 2017.
Strategi dan Teknik Penulisan
Skripsi. Yogyakarta :
Deepublish Publisher.

Sjafrizal 2014. *Perencanaan*
Pembangunan Daerah
Dalam Era Otomomi. Jakarta
: PT Raja Grafindo Persada

Todaro M. P, Smith S 2006.
Pembangunan Ekonomi
Edisi Kesembilan. Jakarta :
Erlangga.